

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

ORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Sekda Pemerintah Kota Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sebelum disampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang berbahagia, Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Salatiga atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 oleh BPK RI yang telah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya. Hal ini atas kerja keras yang disertai dengan dukungan seluruh jajaran pimpinan, staf, dan berbagai pihak dengan penuh pengharapan untuk tahun yang akan datang bisa mendapatkan predikat yang sama.

Sehubungan dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan umum Fraksi yaitu sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah :

Pendapatan Daerah dalam tahun anggaran 2022 yang telah dianggarkan sebesar **Rp905.568.012.938,00** (*Sembilan Ratus Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), dapat terealisasi sebesar **Rp918.353.779.916,00** (*Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*), lebih dari target sebesar **Rp12.785.766.978,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) atau terealisasi sebesar 101,41% dari yang dianggarkan.

Beberapa pendapatan yang kurang/tidak mencapai target antara lain:

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tercapai 98,70%;
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, tercapai 98,53%; dan
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, tercapai 98,27%.

Sedangkan pendapatan yang mencapai target antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tercapai 110,21%;
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, tercapai 100,00%;
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Dana Insentif Daerah; dan
4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan Hibah.

II. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2022 yang telah dianggarkan sebesar Rp. **Rp1.046.499.128.242,00** (*Satu Triliun Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), dan terealisasi sebesar **Rp932.071.471.274,00** (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) kurang dari target yang ditetapkan sebesar **Rp114.427.656.968,00** (*Seratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar **89,07%**.

Adapun perincian Belanja Daerah meliputi :

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi terealisasi sebesar 91,70% dengan rincian Belanja Pegawai terserap 93,31%, Belanja Barang dan Jasa terserap 89,91%, Belanja Subsidi terserap 60,21%, Belanja Hibah terserap sebesar 99,45%, Belanja Bantuan Sosial terserap 98,77%.
2. Belanja Modal
Belanja Modal tercapai sebesar **92,98%** dengan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin terserap 90,40%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terserap 92,73%,

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terserap 95,60%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terserap 81,84%, Belanja Modal Aset Lainnya terserap 85,58%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp34.505.445.600,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam ratus Rupiah)**, dan terealisasi sebesar **Rp2.983.100.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)**, kurang dari target sebesar **Rp31.522.345.600,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)**, atau sebesar **8,65%**.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)**, dan terealisasi sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)**, atau sebesar **100%**.

III. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp142.431.115.304,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)**, dapat terealisasi sebesar **Rp142.431.115.304,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)**, atau **100%**. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dapat terealisasi **Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** atau **100%**.

IV. Laporan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah mencapai **100,00%** karena dari yang dianggarkan sebesar **Rp142.431.115.304,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp142.431.115.304,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)**, yang semuanya dipergunakan sebagai penerimaan pembiayaan.

Setelah kita memperhatikan pengantar nota keuangan RAPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 maka Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan pendapatan, kami sudah mengapresiasi karena realisasi pendapatan telah melebihi dari target pendapatan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi cukup sehat.
2. Bahwa untuk pendapatan, sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan secara elektronik / online agar pendapatan bisa dipantau secara objektif, karena selama ini penerimaan pendapatan masih terkonsentrasi pada sistem manual di khawatirkan masih terjadi penyimpangan. Kalau kita harus melihat kondisi keuangan, untuk tapping box masih relatif sangat kecil, oleh karena itu kita menekankan kepada Dinas-dinas sumber pendapatan untuk lebih memperhatikan agar bisa merealisasikan pengelolaan pendapan ini dengan sistem elektronik. Hal ini untuk menekan

kebocoran-kebocoran terkait dengan pendapatan. Karena kami yakin apabila sistem elektronik ini bisa direalisasikan untuk pendapatan pasti bisa lebih dari apa yang kita peroleh pada saat ini.

3. Terkait dengan bidang kesehatan, Salatiga khususnya dan Indonesia pada umumnya, atas keputusan dari pemerintah pusat telah dinyatakan bahwa terkait dengan Covid-19 sudah bebas yaitu dari pandemi menjadi endemi. Akan tetapi Pemerintah Kota Salatiga harus selalu memonitor dan mencermati dengan perkembangan kesehatan yang ada di masyarakat khususnya Covid-19 ini. Hemat kami Covid-19 belum 100% hilang oleh karena itu pemerintah Kota Salatiga harus betul-betul mencermati jangan sampai Covid-19 ini akhirnya ada lagi diluar monitoring dari Pemerintah Kota. Apabila ada yang terjangkit Covid-19 harus betul-betul Dinas Kesehatan menangani secara optimal.
4. Bahwa harus ada rasionalisasi terkait dengan penganggaran pada tahun berikutnya karena apabila kita melihat dari pelaksanaan APBD Tahun 2022 utamanya untuk anggaran tidak terduga itu serapannya sangat kecil yaitu sebesar 8,65%. Ini menunjukkan bahwa Salatiga dalam keadaan luar biasa / Bencana relatif sangat kecil. Memang pada Tahun 2023 ada beberapa keadaan luar biasa tetapi relatif kecil. Diantaranya adalah tanah longsor, luapan air hujan, dan jembatan putus. Oleh karena itu anggaran tidak terduga bisa dirasionalisasi dimana anggaran tersebut bisa dianggarkan untuk kepentingan yang lain yang lebih prioritas.
5. Bahwa kami mengharapkan Pemerintah Kota Salatiga harus selalu konsisten dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi, diantaranya adalah bagaimana agar anggaran tahun berikutnya bisa terkonsentrasi pada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial terkait dengan anggaran dan kegiatan untuk bisa dinaikkan yaitu untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Dan dalam peningkatan sumberdaya manusia harus mengedepankan unsur pemerataan bagi yang membutuhkan. Dinas terkait dituntut untuk berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Bahwa apabila kita melihat perkembangan terkait bantuan terhadap masyarakat baik untuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dalam perkembangannya yang mestinya masih harus menerima bantuan tetapi pada kenyataannya ada beberapa warga yang tidak mendapatkan bantuan lagi. Ini adanya komplain dari masyarakat, mereka mengeluh bahwa yang semestinya menerima bantuan dengan alasan data hilang akhirnya masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi. Oleh karena itu kami menekankan kepada Dinas terkait harus dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang mesti harus menerima bantuan karena masyarakat masih sangat berharap akan bantuan tersebut.
7. Pemutakhiran terkait dengan data terhadap masyarakat yang harus diberikan bantuan, karena selama ini bantuan sosial masih terjadi tidak tepat sasaran, ada yang semestinya mendapat bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan, namun sebaliknya ada masyarakat yang mendapat bantuan dobel. Perlu adanya objektivitas data sesuai dengan kondisi riil calon penerima, lebih baiknya untuk pemberian bantuan sosial diberikan oleh salah satu dinas, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara OPD terkait. Hal ini seiring dengan pandemi yang sudah menjadi endemi dan sudah dalam kondisi normal.
8. Bahwa setelah kita melihat dari pelaksanaan APBD untuk belanja Operasi masih terjadi kelemahan apabila dibandingkan antara target belanja dengan realisasi terutama dalam Belanja Pegawai. Beberapa tahun anggaran Belanja Pegawai masih mempunyai

sisanya lebih yang cukup tinggi. Untuk Tahun 2022 dari anggaran sebesar **Rp426.916.485.610,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp398.347.572.483,97 (Tiga Ratus Sembilan puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen)**, kurang dari target sebesar **Rp28.568.913.126,03 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah Tiga Sen)**, atau sebesar **93,31%**. Ini terjadi berulang kali, oleh karena itu kami menekankan untuk Belanja Pegawai dalam penghitungannya dilakukan secara cermat.

- 9. Bahwa selain Belanja Pegawai dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Subsidi serapannya masih terlampaui kecil. Untuk belanja Barang dan Jasa saja masih terjadi lebih anggaran sebesar **Rp48.386.719.964,97 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen)** ini relatif cukup besar untuk anggaran yang tidak terserap. Sedangkan Belanja Subsidi serapannya relatif kecil yaitu sebesar 60,21% meskipun Belanja Subsidi ini anggarannya hanya **Rp340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)**. Kami mengharapkan untuk anggaran yang tidak terserap bisa dioptimalkan kepada belanja yang lebih prioritas.
- 10. Bahwa selain hal tersebut diatas, kami berharap agar untuk pendapatan pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan untuk belanja terkait dengan perencanaan harus lebih memprioritaskan kepada aspek kemanfaatan yang betul-betul bisa menunjang seluruh sektor kehidupan yang endingnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 19 Juni 2023

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|---|----|
| 1. Hj. Riawan Woro Endartiningrung, SE. (Ketua) | 1. |
| 2. Agus Pramono, SH. (Wakil) | 2. |
| 3. Sarwono, SE. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Aslinda Afiyanti, SP. (Anggota) | 4. |